

## **Pola Komunikasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Program Keluarga Harapan**

**Siti Noor Fauziyah<sup>1</sup>, Astri Wulandari<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta  
Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Sitinoorfauziyah073@gmail.com<sup>1</sup>, astri@mercubuana-yogya.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kemiskinan yang terjadi di negara ini masih menjadi masalah yang patut diperhatikan dan diperlukan adanya solusi untuk menanggulangnya. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program penuntasan kemiskinan. Bentuk dari Program Keluarga Harapan sendiri yaitu dengan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin untuk meningkatkan kesadaran dalam bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pola komunikasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Teknik analisis data yang digunakan ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian dari analisis Pola Komunikasi dan Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam Program Keluarga Harapan yaitu pola komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan sudah terjalin dengan baik. Begitu pula dengan kinerja pendamping yang sudah baik dalam melakukan pendampingan. Namun pada kenyataannya masih ditemui keluarga penerima manfaat yang kurang tepat sasaran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses pengawasan belum maksimal dikarenakan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan Ilmu Komunikasi.

**Kata Kunci:** *Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan bersyarat, Keluarga Sangat Miskin.*

Diterima : 13-06-2019, Disetujui : 17-06-2019, Dipublikasikan : 7-8-2019

## **The Communication Patterns of Social Service Yogyakarta City in The Keluarga Harapan Programs**

### **Abstract**

Poverty in this country is still being problem with attention and solution to deal with it. The Keluarga Harapan Program is one of poverty alleviation program. The form of Keluarga Harapan Program is giving provision of Conditional Cash Transfers poornes family to increase awareness in the welfare community, health and proverty. The purpose of this research is to find out the communication pattern of the Yogyakarta City Social Service in the Keluarga Harapan Program. Data analysis technique used in this research is analistic in qualitative analysis. The result from the research is communication patterns that occurbetween the leader and employees in the social service has been established and are going well. It same with companion performance who did work. But in reality there are still families of beneficiaries who are not on target. The conclusion in this study were in the implementation of Keluarga Harapan Program the process has not been maximized because who are get the beneficiaries are not on target.

**Keyword:** *Conditional Cash Transfers, Keluarga Harapan Program, Leader and employee*

## Pendahuluan

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara yang salah urus karena tidak ada persoalan yang lebih besar di sini selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, orang tua sulit membiayai kesehatan, mereka tidak bisa menabung untuk masa depan anak-anak. Keluarga tidak memiliki akses ke pelayanan publik serta tidak memiliki jaminan sosial. Selain itu, kemiskinan memicu arus urbanisasi ke kota, serta jutaan anak sulit memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seseorang: mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau ketrampilan untuk berusaha, tidak memiliki kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak memiliki jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil sumber daya alam dan infrastruktur terbatas. (Edi, 2009)

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) guna percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan perlindungan sosial. Program bantuan tunai Bersyarat atau disebut telah dilaksanakan di beberapa negara seperti, Brasil, Kolumbia, Nikaragua, dan Meksiko. ("No Title," n.d.-a)

Suharto menyatakan seperti ini sudah lama dan banyak dipraktikkan di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Prancis, Jerman, Portugis, Kolumbia, Brasil, dan Guatemala (Edi, 2009)

Program ini terbukti berhasil mengurangi beban dan penderitaan kelompok-kelompok sasarannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin dalam mempertahankan daya beli saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan.

Dengan adanya PKH ini pemerintah berharap peserta PKH (Rumah Tangga Sangat Miskin / Keluarga Sangat Miskin) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Program PKH ini juga untuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, terutama kewajiban terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Kewajiban di bidang pendidikan, kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD sampai SMP) termasuk anak Di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan ruti kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi, dan imunisasi anak balita. Sedangkan untuk para penyandang cacat berat yang sudah tidak mampu, mereka tidak wajib mengikuti pendidikan reguler.

Sejak tahun 2012, PKH telah menjadi program nasional. Ada dua pengertian program nasional yaitu pertama, program PKH telah menjangkau seluruh provinsi. kedua, pelaksanaan PKH dilakukan secara

bersam-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian lembaga. (“No Title,” n.d.-b)

Pada rencana awal pelaksanaan PKH, Kementerian Sosial RI telah menyusun tahapan cakupan penerima termasuk pendanaannya yang dimulai sejak tahun 2007 hingga tahun 2015. Dalam rangka memperluas cakupan sasaran, pengembangan program PKH tetap dilaksanakan untuk kabupaten/kota dan pengembangannya kecamatan pada kabupaten/kota yang telah melaksanakan PKH. (“No Title,” n.d.-a)

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta DIY telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. PKH merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam realisasinya masih terdapat adanya kesenjangan antara Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah dan penerimanya. Karena hal tersebut, maka penulis memilih Kecamatan Umbulharjo sebagai lokasi penelitian karena melihat Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan terluas di Kota Yogya.

**Tabel 1 Daftar Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo**

No	Nama Kelurahan
1	Muja Muju
2	Semaki
3	Warungboto
4	Pandeyan
5	Giwangan
6	Sorosutan
7	Tahunan

Sumber : Buku Profil Dinas Sosial 2015

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Umbulharjo**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	PRIA	32.873 jiwa

2	WANITA	34.110 jiwa
<b>Jumlah</b>		66. 983 Jiwa

Sumber: Profil Kecamatan Umbulharjo

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh Fatur Rahman dengan judul penelitian Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Triwidadi Pajangan, Bantul, dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping PKH yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, peran perwakilan dan peran teknis. Hasil pemberdayaan ekonomi yang telah dicapai diantaranya adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi, meningkatnya kemandirian ekonomi warga dan tumbuhnya iklim wirausaha. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui dalam proses pemberdayaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), akses jalan belum seluruhnya memadai, mental pasrah atau dan keterbatas pendanaan.

Penelitian terdahulu tersebut belum melihat lebih jauh mengenai Pola Komunikasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Umbulharjo. Oleh sebab itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) adalah penggambaran Pola Komunikasi yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

### Metodologi Penelitian

Penelitian dalam studi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Richie dikutip oleh Maleong, adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektif subjek penelitian di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan-persoalan tentang subjek yang diteliti (J, 2013)

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus pada seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan dan hasil penelitiannya yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti dan subjek penelitian.

Teknis Analisis Data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyon, 2013)

Dalam mereduksi data, peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program PKH dalam hal ini dikhususkan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antarkategori. Penyimpulan data selanjutnya merupakan bagian akhir dari suatu penelitian setelah sebelum peneliti melakukan proses pengumpulan data, reduksi data, analisis dan terakhir penyimpulan data.

## Hasil dan Pembahasan

Masalah sosial memerlukan perhatian khusus saat kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial

(PPMKS), populasi gelandangan, pengemis, eks penderita psikotik dan lansia terlantar dari luar kota Yogyakarta menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus dan sinergis.

Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat daerah wajib membuat Rencana strategis (RENSTRA) 2017-2022 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan untuk menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek sosial, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi walikota Yogyakarta yang pertama yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberdayaan Masyarakat". Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam mengantisipasi masalah-masalah di bidang sosial, Dinas Sosial menyusun dokumen perencanaan dalam kurun 5 (lima) tahun yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 yang merujuk pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

## Pola Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi, diperlukan suatu proses yang memungkinkannya untuk melakukan komunikasi secara efektif. Proses komunikasi inilah yang membuat komunikasi berjalan dengan baik mencapai tujuannya. Adanya adanya proses komunikasi, berarti terdapat suatu alat yang digunakan sebagai cara dalam berkomunikasi. Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan itu diolahnya menjadi pesan dan dikirimkan melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima.

Pola komunikasi primer adalah proses penyampaian pemikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi seperti bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan PKH pendamping berusaha sebisa mungkin untuk memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat dengan mudah paham dengan apa yang pendamping jelaskan, dari situlah pendamping memilih menggunakan Bahasa daerah yaitu Bahasa Jawa dalam menyampaikan informasi saat pertemuan rutin, meskipun tidak dipungkiri bahwa pendamping juga menggunakan Bahasa Indonesia. Selain dengan Bahasa, pendamping PKH turut serta dalam kegiatan ditengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, seperti halnya kegiatan acara kenduri dan tasyakuran yang digelar oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Surat, telepon, majalah, radio, televisi, film, internet, antara lain-lain adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.

Seiring perkembangan teknologi di akui sangat membantu memudahkan penyampaian Informasi baik dari atas maupun informasi dari bawah. Sehingga informasi dapat dengan cepat disebar luaskan.

Pada prakteknya pihak dari Dinas Sosial kota Yogya telah memerintahkan kepada para pendamping agar memberika Pamflet kepada ketua kelompok PKH agar ditempelkan di papan pengumuman dikampung-kampung. Meskipun pada kenyataannya pamphlet tersebut tidak juga ditempelkan.

Selain itu dalam mendelegasikan tugas Koordinator Kota akan menginformasikan pada Koordinator Kecamatan maupun kepada pendamping PKH. Delegasi tugas biasanya

diinformasikan melalui Grup Whatsapp. Bahkan dalam menginfokan pertemuan rutin kelompok PKH pun para pendamping menginformasikan melalui Grup Whatsapp.

### **Pola Komunikasi Linier**

Pola komunikasi linier disini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka , akan tetapi juga adakalanya komunikasi bermedia. Pada proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi.

Pada komunikasi yang Linier ini, ada beberapa KPM yang sungkan dalam menyampaikan keluhan dan permasalahan yang ada didalam forum pertemuan rutin PKH, sehingga para KPM PKH memilih konsultasi empat mata dengan pendamping PKH.

### **Pola Komunikasi Sirkular**

Dalam proses komunikasi sirkular itu terjadinya atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan.

Pada komunikasi Sirkular ini lebih melihat seperti apa dari para KPM PKH, hal ini bisa kita lihat dari presensi kehadiran anak disekolah yang tiap bulan di cek oleh pendamping PKH. Apabila terdapat anak yang mogok sekolah pendamping PKH memotivasi orang tua dan anak tersebut agar mau melanjutkan sekolahnya. Ketika orang tua mengabarkan bahwa si anak telah mau sekolah kembali, dari situlah kamianggap bahwa peserta PKH tersebut sudah mau memberikan kepada kami.

## Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Berbicara mengenai Persuasif ini merupakan tugas utama dari Dinas Sosial beserta jajarannya, dimana mereka bertugas untuk merubah pola pikir dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara latar belakang, kehidupan mereka adalah masyarakat kelas bawah. Dalam pertemuan rutin sendiri biasanya dilakukan tiap bulan di Balai Desa, namun beberapa kelompok PKH di tiap kampung memiliki kumpulan rutin atau biasa disebut dengan Arisan PKH sehingga biasanya pertemuan rutin tidak menutup kemungkinan dilakukan dirumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat. Harapannya dengan hal ini mereka para KPM bisa merasa lebih dekat dan terjalin ikatan dengan Pendamping PKH sehingga lebih mudah memotivasi mereka.

Pesan komunikasi persuasif yang biasa dilakukan oleh pendamping antara lain untuk memotivasi para KPM dalam memperhatikan kesehatan, pendidikan, dan keuangan rumah tangga. Seperti halnya ibu yang sedang hamil wajib melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin ke Puskesmas, pemeriksaan ini bertujuan agar tidak terjadi kelahiran yang tidak diinginkan. Selain itu pendamping PKH juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan PKH ini ada beberapa penerima manfaat yang diasumsikan kurang tepat sasaran.

## Efektivitas Pesan Komunikasi Persuasif

Dampak dari efektifitas Komunikasi persuasif sendiri bisa berupa berubahnya sikap, pendapat, pandangan dan tingkah laku. Dalam komunikasi persuasif, terjadinya perubahan, baik dalam aspek sikap maupun perilaku pada diri merupakan tujuan yang utama. Menurut salah seorang KPM

PKH menjelaskan bahwa dengan adanya pertemuan rutin PKH di tiap bulannya Ibu yanti menjelaskan bahwa dia harus ijin dari tempat kerjanya untuk menghadiri pertemuan rutin, dimana dalam pertemuan rutin ini setiap kehadiran juga ada presensi kehadiran sehingga dapat dipantau tingkat kedisiplinan para KPM.

## Komunikasi Organisasi Dinas Sosial dalam PKH

Komunikasi Ke Bawah. Komunikasi ini berasal dari seseorang yang mempunyai posisi yang lebih tinggi kepada seseorang yang status lebih rendah. Komunikasi ini berupa kebijakan, petunjuk, dan informasi. Ini terlihat pada komunikasi yang dilakukan oleh pengurus PKH, dimana SPV akan menginfokan pemberitahuan ataupun mendelegasikan tugas kepada para Koordinator Kecamatan maupun ke pendamping PKH, penyampaian informasi ini biasanya dilakukan melalui telepon atau

Komunikasi ke Atas. Komunikasi ini adalah kebalikan dari komunikasi kebawah. Dimana komunikasi ini berisi laporan desas-desus (rumor), permohonan, tuntutan, dan keinginan. Komunikasi ini dilakukan melalui tatap muka, surat kabar, surat terbuka, surat kaleng, dan sebagainya.

Komunikasi ini terjadi pada rapat koordinasi PKH, dimana rapat ini dilakukan tiap bulannya di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Pada rapat tersebut pendamping akan melaporkan mengenai hal-hal yang sekiranya ditemui dilapangan ketika pendampingan, seperti halnya laporan mengenai adanya KPM PKH yang mencairkan dana lebih dulu sebelum mendapatkan perintah maupun informasi dari pendamping PKH. Ini menjadi kendala dimana kedisiplinan KPM PKH dipantau oleh sistem dan Kemensos RI.

Komunikasi Horizontal. Komunikasi

horizontal sendiri mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempercepat jalan komunikasi antar bagian yang memiliki status yang sama. Dan dapat menyatukan organisasi secara sosial. Komunikasi ini diterapkan dimana pendamping pada satu kelurahan akan membantu pendamping lain pada kelurahan yang berbeda. Ini bertujuan untuk melancarkan komunikasi dan pendampingan, dimana jumlah KPM PKH yang banyak sehingga diharapkan memperlancar jalannya komunikasi untuk program tersebut.

### **Kesimpulan**

PKH dilahirkan untuk menurunkan dan memutus rantai kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar Kesehatan dan Pendidikan agar terlahir Generasi yang Sehat dan Cerdas, Mandiri dan Sejahtera. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial yang divalidasi dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini pemerintah Khususnya Kementria Sosial dan Dinas Sosial di Kabupaten/Kota berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kemiskinan khususnya di Kota Yogyakarta.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan beberapa UPT dinas terkait pun baik, namun dengan begitu tidak menutup kemungkinan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan ini ada

yang salah sasaran. Ini merupakan PR untuk para pengurus dan pendamping PKH dari Dinsos untuk memberikan motivasi kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang sekiranya kurang tepat sasaran ini untuk mengundurkan diri dari kepesertaan program ini. Meski diakui hal ini cukup menjadi hal yang berat bagi para Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah hidupnya sudah biasa ditompang oleh bantuan tersebut.

Pola Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial hingga ke jajaran yang paling bawah dirasa baik. Mengkoordinir para pengurus PKH baik dari SPV, Koorcam dan pendamping bukanlah hal sulit ini dikarenakan bahwa Dinas Sosial juga bekerja sama dengan UPT terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan kantor kelurahan, sehingga apabila ada hal yang kurang baik terkait pelaksanaan PKH dilapangan maka pihak-pihak tersebut akan melapor ke pihak Dinas Sosial.

Kinerja pengurus PKH khususnya pendamping juga dirasa baik dan sangat profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memantau kinerja pendamping ini SPV dan Koordinator Kota melihat tingkat ketepatan waktu pendamping mengumpulkan laporan dalam tiap bulannya. Selain itu menurut para peserta penerima bantuan juga menambahkan bahwa cara kerja para pendamping ini dirasa sudah sangat baik, selain para pendamping ini sangat sabar dalam memberikan penjelasan kepada para KPM PKH, mereka juga merasa dengan adanya bantuan PKH ini sangat membantu mereka dalam pencukupan kebutuhan rumah tangga.

### **Daftar Pustaka**

- Edi, S. (2009). . Bandung: Alfabeta.  
J, M. L. (2013). . Bandung: Remaja Rosdakarya.

No Title. (n.d.-a).

No Title. (n.d.-b). Retrieved March 1, 2019,  
from [dinsos.jogjaprov.go.id](http://dinsos.jogjaprov.go.id).

Sugiyon. (2013). . Bandung: Alfabeta.